

Model Penguatan Orientasi Politik Pemilih Dalam Pilkada Secara Langsung di Kabupaten Konawe

Sulsalman Moita, Sarmadan, Ratna Supiyah, La Ode Monto⁶¹

Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Halu Oleo, Kendari

Email: moitasulsalman@yahoo.co.id

Abstract

The research "Strengthening the Political Orientation of Beginner Voters in Direct Local Elections" aims to encourage voter behavior by referring to rational choice theory. Currently voter rationalization is based on direct, general, free, confidential, honest and fair principles; many are co-opted by political choice because the influence of pragmatism and transactional actions so that the practices of money politics have a lot to color the constituent political choices, including beginner voters. Konawe Regency in 2018 was one of the regions that held direct regional elections. In terms of quantity, the potential of novice voters in this region is quite significant, because in the span of 5 years it is estimated that around 15% are beginner voters. The existence of beginner voters must be the concern of all stakeholders because in the age structure, they are transitional age groups that have the potential to be influenced by the choice of non-rational considerations. Based on these considerations, the purpose of this study is to identify the typology of the political orientation of beginner voters and analyze the model of strengthening political orientation ahead of direct regional elections. Research method with a qualitative approach supported by primary and secondary data sources. Data collection techniques with in-depth interview and observation techniques, while the data analysis technique is done by explaining the phenomena and facts related to the political orientation of the beginner. The results showed: the typology of the beginner voters' political orientation refers to a number of indicators such as: 33% political choice due to the influence of family institutions, 15% due to the influence of political institutions, 14% due to media influence, 14% due to social environmental influences; and 24% because of the influence of political brokers who emerged at the time of the elections with a transactional

⁶¹ Dosen Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Halu Oleo Kendari

approach. Furthermore, the model of strengthening the political orientation of beginner voters is a strategy to strengthen political institutions based on values and political culture so as to produce egalitarian, honest, fair voters based on democratic principles. The findings show a model offer for strengthening political orientation, namely: a model of political symbolization, strengthening the capacity of political leaders / candidates, strengthening the candidates' vision and mission, and political marketing strategies.

Keywords: Political Orientation, Beginner Voter, Democracy, Voter Behavior.

A. Pendahuluan

Memasuki tiga dasawarsa terakhir di awal abad ke-20, ada satu fenomena menarik di tengah-tengah masyarakat dunia, khususnya bangsa Indonesia, yaitu menguatnya tuntutan akan demokratisasi. Demokrasi dipandang sebagai sistem yang mampu mengantarkan masyarakat ke arah transformasi sosial politik yang lebih ideal. Demokrasi dinilai lebih mampu mengangkat harkat manusia, lebih rasional, dan realistis, untuk mencegah munculnya suatu kekuasaan yang dominan, represif, dan otoriter.

Pemilihan umum adalah pengejawatahan nilai-nilai demokrasi sekaligus jalan lurus untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Bagi Indonesia khususnya pasca amandemen UUD 1945, pelaksanaan pemilu bukan lagi sekedar rutinitas politik dan aksesoris demokrasi. Namun seiring dengan era reformasi, pemilu telah menjadi agenda nasional yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi krisis kenegaraan dan kebangsaan yang nyaris mengancam keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia (Sudaryanti, 2008).

Tahun 2004 merupakan momentum dimana bangsa kita mulai melaksanakan pemilihan secara langsung, baik pemilihan anggota legislatif di semua tingkatan, pemilihan anggota DPD, maupun pemilih presiden dan wakil presiden. Pemilihan mendorong partisipasi rakyat untuk turut menyalurkan hak pilihnya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan di era reformasi menjadi *starting point* bagi rakyat untuk mulai meninggalkan mekanisme dan dinamika pemilihan yang penuh dengan intrik, mobilisasi, dominasi, bahkan paksaan seperti yang terjadi selama Pemerintahan Orde Baru.

Pemilih pemula merupakan segmentasi demokrasi dan politik yang harus dipertimbangkan oleh seluruh elemen politik, karena eksistensi mereka menentukan masa depan politik Indonesia. Guna mewujudkan pemilih pemula yang rasional, maka pendidikan politik yang elegan, santun, dan demokratis adalah tuntutan guna mewujudkan tata-tatan kelembagaan demokrasi Indonesia yang sesungguhnya sesuai dengan cita-cita dan semangat Pancasila dan UUD Dasar 1945.

Pada tahun 2018, Kabupaten Konawe telah melaksanakan Pilkada secara langsung untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023. Hasil pleno KPUD Konawe tanggal 19 April 2018 menunjukkan jumlah wajib pilih (DPT) Pilbub adalah 159.065 jiwa. Jika dibandingkan DPT Pilpres tahun 2014 yang mencapai 142.475 jiwa, maka terdapat DPT sebanyak 16.590 atau 10,43%. Berdasarkan data tersebut, maka potensi pemilih pemula menjadi penting baik bagi parpol pengusung, kandidat, maupun stakeholder politik secara makro. Eksistensi potensi pemilih pemula, selain turut menentukan pemenang kontestasi, juga perlu didukung oleh orientasi politik yang

memadai sehingga ketika menentukan pilihan politiknya, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional dan obyektif, bukan karena pertimbangan transaksional atau pragmatis.

Model penguatan orientasi politik pemilih pemula merupakan konstruksi bagi semua pemangku kepentingan untuk mereduksi dan mengeliminir praktek-praktek pilkada secara langsung yang marak dengan politik uang (*money politics*). Pembiaran politik uang pada pemilih pemula, selain dapat mencederai nilai-nilai demokrasi juga akan menjadi pembelajaran demokrasi yang buruk, sehingga kualitas kepemimpinan yang dihasilkan penuh dengan praktek KKN, termasuk generasi penerus (pemuda) akan mendapat pola pendidikan politik yang anti demokrasi.

B. Tinjauan Pustaka

1. Teori rasionalitas Max Weber

Teori rasionalitas Max Weber (dalam Ritzer, 2010), menjadi salah satu *grand theory* untuk mengkaji perilaku politik pemilih pemula. Salah satu ide penting Weber dalam menjelaskan tindakan sosial adalah ide tentang rasionalitas. Sebagai bagian dari paradigma definisi Sosial, rasionalitas dalam pandangan Weber tidak terlepas dari individualitas dan pemahaman subjektif dari individu. Tindakan Rasional menurut Weber berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Selanjutnya Weber (dalam Bachtiar, 2006) membuat 4 kategori tindakan yang digolongkan pada rasional dan non rasional yakni: 1) Rasionalitas instrumental, yakni tingkat rasionalitas yang paling tinggi dengan melibatkan

pertimbangan dan pilihan sadar dari individu; 2) Rasionalitas yang berorientasi nilai. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi tidak relevan jika dihubungkan dengan nilai yang dijadikan tujuan; 3) Tindakan tradisional adalah tindakan dengan menjalankan tradisi nenek moyang, melakukan kebiasaan orang-orang yang terdahulu; 4) Tindakan afektif, yang ditandai oleh dominasi perasaan atau emosi tanpa adanya refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar.

Keempat jenis tindakan social tersebut menurut Max Weber, jika disinergikan dengan perilaku politik pemilih maka paling tidak, akan menggambarkan tipologi perilaku politik pemilih pemula, apakah termasuk dalam kategori perilaku pemilih rasional dan kritis atau kategori perilaku pemilih tradisional dan skeptik.

2. Teori Pilihan Rasional

Grand Theory dalam sosiologi lainnya yang digunakan untuk mengkaji perilaku politik pemilih pemula adalah teori pilihan rasional. Menurut Coleman (dalam Ritzer & Goodman, 2004), substansi teori ini terletak pada gagasan bahwa tindakan perseorangan mengarah kepada suatu tujuan dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan. Sementara Abercrombie dkk (2010), menyatakan bahwa argumen dasar yang diajukan teori pilihan rasional, sebuah asumsi metateoritis daripada sebuah generalisasi empiris, adalah bahwa masyarakat bertindak secara rasional.

Elster (dalam Marsh & Stokker, 2010), menyatakan bahwa intisari pilihan rasional adalah tindakan apa yang dilakukan seseorang yang

diyakini berkemungkinan dapat memberikan hasil terbaik. Pilihan rasional muncul sebagai revolusi pendekatan perilaku (*behavioral approach*) dalam ilmu politik yang sebenarnya berusaha meneliti bagaimana individu berperilaku dan menggunakan metode empiris.

3. Konsep Perilaku Pemilih

Menurut Jack Plano (dalam Sudaryanti, 2008), studi perilaku pemilih memusatkan pada bidang yang menggeluti kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilu, serta latar belakang melakukan pilihan itu. Surbakti (1997) menyatakan perilaku pemilih adalah aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih dan tidak memilih. Pandangan yang lain berasal dari Firmanzah (2008), bahwa ada 3 faktor determinan bagi pemilih dalam memutuskan pilihan politiknya, yakni: 1) kondisi awal pemilih adalah karakteristik yang melekat dalam diri pemilih; 2) faktor media massa yang mempengaruhi opini publik; 3) faktor parpol atau kontestan. Pemilih akan menilai latar belakang, reputasi, citra, ideologi, program, visi/misi, dan kualitas para tokoh-tokoh parpol dengan pandangan mereka masing-masing.

Eep Saifullah Fatah (dalam Efriza, 2012), mengemukakan bahwa secara umum, pemilih dikategorikan ke dalam 4 kelompok utama, yaitu: 1) *Pemilih Rasional Kalkulatif* yakni pemilih yang memutuskan pilihan politiknya berdasarkan perhitungan rasional dan logika; 2) *Pemilih Primordial* adalah pemilih yang menjatuhkan pilihan politiknya karena alasan primordialisme, seperti alasan agama, suku, dan keturunan; 3) *Pemilih Pragmatis* adalah pemilih yang banyak dipengaruhi oleh pertimbangan untung dan rugi; 4)

Pemilih Emosional. Kelompok pemilih ini cenderung memutuskan pilihan politiknya karena alasan perasaan.

4. Konsep Pemilih Pemula

Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin (Pahmy SY,2010). Pemilih dalam setiap pemilihan umum didaftarkan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara pemilihan umum. Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih yaitu 17 hingga 21 tahun. Pengetahuan mereka terhadap pemilu tidak berbeda jauh dengan kelompok lainnya, yang membedakan adalah soal antusiasme dan preferensi.

Pemilih pemula memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang belum bulat, sebenarnya menempatkan pemilih pemula sebagai swing voters yang sesungguhnya (Litbang Kompas, 2015). Pilihan politik mereka belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal. Pemilih pemula mudah dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dari orangtua hingga kerabat dan teman. Selain itu, media massa juga ikut berpengaruh terhadap pilihan pemilih pemula.

5. Konsep Orientasi Politik

Orientasi politik merupakan suatu cara pandang dari suatu golongan masyarakat dalam suatu struktur masyarakat. Timbulnya orientasi itu dilatarbelakangi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat maupun dari luar masyarakat yang kemudian membentuk sikap dan menjadi pola mereka untuk memandang suatu obyek politik. Orientasi politik itulah yang kemudian membentuk tatanan dimana interaksi-interaksi yang muncul tersebut akhirnya mempengaruhi perilaku politik yang dilakukan seseorang.

Efriza (2012) berpandangan bahwa budaya politik merupakan sejumlah orientasi, keyakinan, dan perasaan, yang memberikan sistem bagi proses kegiatan politik, juga memberikan kaidah-kaidah baku yang mengatur tindakan individu di dalam sistem politik. Orientasi terhadap tema-tema politik menurutnya menyangkut 3 aspek yakni: 1) *Orientasi Kognitif (Parochial)*. Individu dalam komunitas sosial hanya sekedar mengenal simbol-simbol politik, pengetahuan mendasar tentang politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya. Orientasi kognitif ini bisa dicontohkan dengan sikap politik seseorang saat menentukan pilihan politik; 2) *Orientasi Afektif (Subject)*. Dalam bersikap politik, individu memiliki perasaan mendalam terhadap sistem politik, peranannya dan para aktor politiknya; 3) *Orientasi Evaluatif (Partisipan)*. Orientasi dan sikap politik individu sudah terlibat aktif dalam proses politik. Individu memahami betul program dan perjuangan partai.

C. Metode Penelitian

Lokus penelitian dilaksanakan di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan fokus pada orientasi politik pemilih pemula dalam Pilkada secara langsung tahun 2018. Indikator pemilih pemula menasar pada sejumlah segmen terutama siswa sekolah menengah di beberapa sekolah baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun pedalaman. Selain itu itu, segmen pemilih pemula dari pekerja sektor informal/formal, anggota keluarga dalam rumah tangga, dan anggota organisasi kepemudaan.

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah seratus orang dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket, wawancara, dan observasi pada saat kampanye politik dan hari pencoblosan. Selain itu guna memperoleh validitas dan reliabilitas data juga ditetapkan sejumlah *key informan*, antara lain: pimpinan/ pengurus partai politik pengusung, orang tua, tokoh masyarakat, guru, dan NGO semi politik.

Selanjutnya teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Teknik analisis data kualitatif dilakukan pada saat masih di lapangan dan setelah data terkumpul. Untuk keperluan analisis data kualitatif ditempuh dengan urutan kegiatan analisis secara bertahap, yaitu: 1. proses reduksi data yang terfokus pada pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar dari catatan lapangan; 2. penyajian data yaitu penyusunan kesimpulan informasi menjadi pernyataan yang memungkinkan penarikan kesimpulan, dan 3. Penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi dan penyajian data.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Tipologi Orientasi Politik Pemilih Pemula Menjelang Pilkada Secara Langsung di Kabupaten Konawe

Mengacu pada teori/konsep perilaku pemilih dan orientasi politik serta fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, maka kecenderungan pemilih pemula dalam menentukan pilihannya pada Pilkada secara langsung di Kabupaten Konawe, terurai pada tabel berikut ini.

Tabel 1

Tabel Tipologi Orientasi Politik Pemilih Pemula

No	Preferensi Politik Pemilih Pemula	Jumlah	Persentase
1	Institusi Keluarga	33	33
2	Pengaruh Media/Pers	14	14
3	Lembaga Politik	15	15
4	Lingkungan Sosial (Teman Sebaya, Sekolah, Masyarakat)	14	14
5	Broker Politik (Transaksional)	24	24
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2018.

- Pengaruh institusi keluarga

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat lima indikator preferensi orientasi politik pemilih pemula, dimana 33% pilihan dalam Pilkada karena pengaruh insitusi keluarga (orang tua, mertua, paman, bibi, kakak, nenek, sepupu, dan sebagainya). Hasil ini ideal, karena lembaga keluarga sebagai peletak dasar nilai-nilai pendidikan karakter sekaligus wahana pendidikan informal. Dalam aspek pendidikan politik, insitusi keluarga juga memberi tatanan tentang eksistensi nilai-nilai demokrasi seperti kebersamaan, komitmen, kejujuran, ketaatan, tanggungjawab, dan sebagainya. Sehingga ketika otoritas keluarga seperti orang tua, menggiring pilihan politik anaknya pada suatu kandidat maka normatif untuk ditaati dan diikuti. Asumsinya, orang tua tentu cenderung memberikan opsi pilihan bagi anak yang terbaik, berdasarkan preferensinya.

Data penelitian juga mengungkapkan bahwa pada institusi keluarga yang relatif egaliter, pilihan anak pada kandidat diserahkan pada anak itu sendiri sesuai dengan prinsip *luber dan jurdil*. Orang tua atau kerabat dekat, dalam posisi ini tidak ingin membebani pilihan anak secara dominatif tetapi hanya memberi opsi-opsi pada preferensi tentang kekuatan-kekuatan, kelemahan-kelemahan, dan potensi-potensi dari kandidat. Orang tua juga menyarankan kepada anak (pemilih pemula) untuk menelusuri dan mengidentifikasi sumber atau referensi lain terkait dengan kandidat, sehingga ketika memutuskan pilihannya sesuai berdasarkan atensi dan keyakinannya.

- Pengaruh broker politik

Pengaruh broker politik (politik transaksional dan pragmatis), dalam faktanya menjadi opsi kedua yang mempengaruhi pemilih pemula dengan persentase yang signifikan yakni 24%. Secara faktual, broker politik adalah penghubung politik yang melihat potensi pemilih pemula dapat dipengaruhi tanpa rasionalitas yang memadai. Artinya sikap, perilaku, dan tindakan pemilih pemula pada usia transisi memberi ruang yang lebih luas untuk mempengaruhi pilihannya pada aspek-aspek non rasional.

Temuan penelitian mengungkapkan data tentang sebagian pilihan politik pemilih pemula karena faktor politik transaksional, misalnya pemberian hadiah, sumbangan, dan uang (financial). Modusnya selain yang lebih transparan dengan *money politics* secara langsung pada seminggu atau tiga hari sebelum pencoblosan, juga dilakukan dalam bentuk sumbangan organisasi kepemudaan, karang taruna, kegiatan sekolah, serta pembinaan minat dan bakat.

Pengaruh broker politik juga sangat efektif pada kelompok pemilih pemula putus sekolah, pengangguran, dan pekerja serabutan. Faktor ekonomi dengan pendapatan yang nihil atau minim, menjadikan praktek politik uang sebagai peluang yang ditunggu setiap pesta pemilu, baik pemilu legislatif maupun Pilkada. Beberapa informan yang diwawancarai, menyatakan bahwa siapapun yang terpilih menjadi bupati/wakil bupati itu soal hasil dari kontestasi, yang utama adalah kompensasi yang mereka dapatkan setelah menyalurkan hak pilihnya.

- Pengaruh lembaga politik

Selanjutnya, pengaruh eksistensi lembaga politik secara struktural mempengaruhi pilihan pemilih pemula. Kondisi ini, banyak menguntungkan partai politik yang sudah mapan baik secara kelembagaan, finansial, maupun SDM politik. Kemapanan infrastruktur partai politik di arena kontestasi nampak pada penggunaan media simbol untuk mengkampanyekan calonnya, seperti penggunaan baliho, spanduk, stiker, iklan media, dan sebagainya.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa, faktor dukungan lembaga politik mempengaruhi pilihan pemilih pemula sebanyak 15%. Mereka adalah pemilih yang sering dilibatkan dalam kegiatan kampanye terbuka dengan menghadirkan artis ibukota, ulang tahun partai dan road show kandidat dengan kompensasi seperti biaya transportasi dan konsumsi. Pada umumnya, pemilih pemula senang dengan kegiatan seperti ini, karena merupakan salah satu melu pembelajaran politik, demokratis, kepemimpinan.

- Pengaruh lingkungan sosial

Pengaruh lingkungan sosial, merupakan variabel yang turut mempengaruhi pilihan politik pemilih pemula dengan persentase 14%. Pengaruh ini berasal dari lingkungan teman sebaya, teman sekolah, dan lingkungan masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa intensitas pertemanan pada kelompok usia sebaya banyak menciptakan dinamika interaksi, komunikasi, dan jejaring baik hal-hal umum maupun eksklusif termasuk politik. Euforia demokrasi menjadi momentum kaum muda untuk terlibat dalam politik

praktis, kondisi yang sulit diperoleh di masa orde baru. Demokrasi yang egaliter dan responsif mendorong pemuda dalam kelompok sebaya membentuk organisasi-organisasi informal untuk menyatukan aspirasi mereka, kemana arah dukungan kandidat dalam kontestasi Pilkada.

Setiap kandidat dan parpol pengusung, membentuk posko-posko pemenangan di setiap desa, kelurahan, dan wilayah kantong-kantong suara. Biasanya posko-posko pemenangan itu diinisiasi, diberdayakan, dan menjadi tempat diskusi kaum muda yang sebagian di antaranya adalah pemilih pemula.

Selanjutnya pengaruh teman sekolah walaupun dinamika pengaruhnya relatif kecil, namun diskusi-diskusi internal di luar jam sekolah tak jarang membicarakan pilihan kandidat kontestasi Pilkada. Diskusi hanya pada tataran, kelak nanti akan memilih siapa, respon orang tua, pengalaman tentang kampanye, dan akhirnya mengerucut pada komitmen memilih siapa?. Pada lingkungan yang lebih makro (lingkungan sosial), sebagian respon menjawab bahwa pengaruh atas pilihan karena rekomendasi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, dan tokoh perempuan.

- Pengaruh Media

Media merupakan perangkat teknologi yang paling cepat dan tepat mempengaruhi opini publik. Di era wacana saat ini, ragam media telah memasuki semua relung-relung kehidupan manusia tanpa batas, terbuka, dan mengglobal. Media menjadi wahana bagi politisi dan parpol untuk mengaktualisasikan visi dan misi serta program kandidat.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa terdapat 14% responden yang menyatakan pilihan atas kandidat Bupati/ karena pengaruh media, baik media massa, media elektronik, dan media online. Iklan media melalui koran lokal seperti Kendari Pos dan Media Sultra menjadi instrumen bagi pemilih pemula mengetahui visi dan misi, pengalaman kandidat, dan program jika terpilih. Media lain seperti siaran TV lokal juga menjadi opsi lain bagi pemilih pemula untuk mengetahui kapasitas dan kompetensi calon. Selain itu, media online nampaknya telah menggeser pilihan konstituen akan bacaan media. Pemanfaatan android bagi pemilih pemula dapat menjadi wahana pendidikan politik dengan membaca profil dan pengalaman kandidat dari media online.

2. Model Orientasi Politik Pemilih Pemula dalam Pilkada Secara Langsung

Di Kabupaten Konawe

- Model simbolisasi politik

Model simbolisasi politik menempatkan identitas etnik sebagai salah satu tujuan berpolitik. Menjamurnya parpol dengan berbagai latarbelakang ideologi, platform politik, tokoh politik, dan garis perjuangan berkorelasi dengan tipologi pemilih dari berbagai segmentasi. Mengacu pandangan Weber, tentang rasionalitas pemilih (konstituen), memang agak sulit dihindari proses menggiring pemilih rasional yang benar-benar menyalurkan hak pilihnya karena visi misi partai dan kandidat, karena pada akhirnya pilihan disebabkan karena pengaruh konstruksi identitas etnis.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konstruksi model simbolisasi

etnik banyak dimanfaatkan oleh elit-elit politik berpengalaman untuk menjaring pemilih pemula dengan mengedepankan isu-isu kedaerahan, agama, geografis, dan nilai budaya. Isu dan tema tersebut, umumnya dilakukan pada saat kampanye tertutup, dan *door to door*.

Hasil wawancara dengan informan Rs (41 th) menunjukkan bahwa: ketika mengkampanyekan kandidat Bupati usungan parpol kami, “isi kampanye salah satunya adalah pilihlah calon pemimpin yang berasal dari daerah yang sama” karena kami akan memperjuangkan aspirasi dan harapan melalui program dan anggaran pembangunan (Wawancara, tanggal 4 Maret 2018).

Hasil wawancara tersebut walaupun cenderung tendensius dan beraroma primordialisme, namun menjadi strategi jika dilakukan pada model kampanye terbatas atau *door to door*. Pemilih pemula dengan pengalaman politik yang masih minim, nampaknya dengan konstruksi model simbolisasi seperti ini cukup ampuh untuk menentukan pilihan mereka pada kandidat.

Model simbolisasi politik juga menysar pada identitas keberagamaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa walaupun semua kandidat (Bupati dan Wakil Bupati) beragama Islam, namun tokoh dan pengurus parpol non Islam mengkampanyekan kandidat mereka atas nama komunitas agama; bukan ajaran agama. Misalnya, jika medan atau wilayah kampanye mayoritas penduduknya beragama Hindu, maka pilihan tim kampanye berasal dari etnis Bali adalah rasional untuk menggiring suara pemilih termasuk pemilih pemula.

Hasil wawancara dengan Nyoman Ar (54 th), menyatakan bahwa: pilihan parpol memilih saya sebagai juru kampanye kandidat Bupati/Wakil Bupati di Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Tongauna

sangat tepat, karena saya mampu memenangkan kandidat di dua TPS yang mayoritas pemilihnya adalah etnis Bali (Wawancara, tanggal 17 Juli 2018).

Pernyataan informan tersebut merupakan konstruksi model simbolisasi politik yang secara eksplisit mengusung isu dan fakta komunitas keberagaman dalam menjangkau suara pemilih. Posisi Nyoman Ar yang kebetulan beretnis Bali dan beragama Hindu, cukup meyakinkan untuk meraup suara pemilih daripada mendorong tokoh luar yang secara identitas kurang dikenal. Sosok Nyoman Ar, dalam keseharian menjadi inspirator bagi generasi muda setempat, karena sejumlah kegiatan pemuda lahir dari inisiatif beliau sehingga wajar dari aspek komunikasi politik pilkada, pemilih pemula turut memilih apa yang diperjuangkan oleh Nyoman Ar tersebut.

- Penguatan kapasitas tokoh politik/kandidat

Model penguatan kapasitas tokoh politik menempatkan sosok politisi sebagai figur yang memiliki kapasitas, kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumberdaya yang dapat diteladani oleh konstituen atau masyarakat secara umum. Definisi tokoh politik dalam riset ini, menampilkan sosok kandidat calon yang diusung oleh partai politik, yang merepresentasikan aktor-aktor partai politik dengan kemampuan komunikasi politik dalam konteks pathos, ethos, dan logos.

Pemilih pemula sebagai kelompok pemilih yang kurang memiliki preferensi yang memadai dan obyektif terhadap kandidat yang dipilih, maka pertimbangan penguatan kapasitas tokoh dapat menjadi alternatif atas discoursus tokoh yang dalam beberapa tahun terakhir dengan image negatif

atas berbagai kasus hukum dan korupsi yang melanda para politisi di negeri ini.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) pola yang dilakukan oleh kandidat untuk meyakinkan konstituen dalam pilkada secara langsung yaitu: soal popularitas, acceptabilitas (penerimaan publik), dan preferensi pemilih. Di level popularitas misalnya. Kandidat membutuhkan data seberapa besar ia dikenal oleh pemilih. Segmen masyarakat mana saja yang belum mengenal, apa strategi yang bisa dilakukan untuk mendekatkan diri dengan pemilih agar lebih dikenal dan sebagainya.

Dari empat pasangan kandidat kontestan Pilkada, incumbent yang maju kembali pada periode kedua diuntungkan oleh popularitas melalui iklan jargon-jargon pembangunan yang dilakukan secara masif dan konsisten di semua SKPD dan lembaga-lembaga, Ormas, dan NGO yang berafiliasi serta bersinergi dengan Pemerintah Daerah. Calon lain juga relatif dikenal karena sebagian adalah eks Birokrat, eks anggota DPD, eks anggota DPR Provinsi dan Kabupaten, dan pengusaha lokal; namun preferensi incumbent yang kuat dan terstruktur apalagi diusung oleh parpol pemenang di tingkat kabupaten menjadikan penguatan kapasitas tokoh relatif lebih mudah dan terukur.

- Penguatan visi misi kandidat

Model penguatan visi dan misi kandidat merupakan strategi yang paling rasional untuk mempengaruhi pemilih pemula. Istilah bahwa pilihan bukan seperti membeli kucing dalam karung, adalah pandangan orang bijak bahwa memilih harus memiliki tujuan yang pasti, dan tujuan itu adalah

kandidat yang dipilih dapat membawa aspirasi rakyat serta meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyampaian visi dan misi kandidat pada saat debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe periode 2018-2023 yang ditayangkan oleh TV News, relatif mendapat respon signifikan dari masyarakat terutama melalui media sosial seperti *Face book* dan Instagram. Tanggapan positif dan negatif mewarnai laman akun media sosial tersebut, demikian pula diskusi-diskusi di warung kopi, rumah makan, pasar, tempat umum beberapa hari pasca debat dapat menggiring opini publik walaupun belum pasti mengubah pilihan politik konstituen, termasuk pemilih pemula. Namun demikian, beberapa responden yang diwawancara menyatakan bahwa pengaruh visi dan misi kandidat mampu mengalihkan pilihan mereka atas pilihan kandidat sebelumnya; karena alasan kekuatan visi dan misi dan program yang akan dilakukan ketika kelak terpilih.

- **Strategi marketing politik**

Persaingan politik dipercaya akan meningkatkan inovasi politik di antara pihak-pihak yang berkompetisi. Inovasi politik diartikan sebagai temuan ataupun perbaikan atas isu-isu dan program kerja politik yang disesuaikan dengan setiap perubahan yang ada dalam masyarakat.

Marketing politik memiliki andil yang kuat dalam menentukan proses demokratisasi. Partai politik mengarahkan kemampuan marketing untuk merebut sebanyak mungkin konstituen. Marketing politik dapat memperbaiki kualitas hubungan antara kontestan dengan pemilih. Pemilih

adalah pihak yang harus dimengerti, dipahami, dan dicarikan jalan pemecahan dari setiap permasalahan yang dihadapi. Marketing politik meletakkan bahwa pemilih adalah subyek, bukan obyek manipulasi dan eksploitasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi marketing politik parpol pengusung menjadi model dalam mempengaruhi pilihan politik pemilih pemula. Keberadaan pemilih pemula yang masih awam, belum berpengalaman, pendidikan politik yang minim menjadi peluang bagi kandidat dan parpol. PAN, misalnya menawarkan marketing politik pada pemilih pemula melalui adagium “pemilih cerdas, elegan, dan inovatif” dengan banyak melakukan road show kegiatan bernuansa remaja seperti lomba minat dan bakat, kegiatan olahraga, jalan santai, dan sebagainya. Selanjutnya PDIP melakukan strategi marketing politik untuk menyasar pemilih pemula melalui program yang bernuansa agamis; kemudian PBB dan Partai Golkar mengusung strategi marketing politik melalui kreativitas pementasan budaya lokal.

3. Kesimpulan

Tipologi orientasi politik pemilih pemula menjelang pilkada secara langsung di Kabupaten Konawe menunjukkan masih kuatnya pengaruh lingkungan keluarga dalam mempengaruhi pilihan politik pemilih pemula. Pada orientasi yang lain, pengaruh *broker politik* secara gradual berkembang seiring dengan lemahnya pendidikan politik konstituen serta inkonsistensi kandidat untuk tidak melakukan politik uang. Budaya politik uang yang semakin menjamur, jika dibiarkan akan menghasilkan kualitas kepemimpinan

berpotensi besar melakukan KKN dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan.

Model orientasi politik pemilih pemula menjelang pilkada secara langsung di Kabupaten Konawe adalah opsi atau tawaran untuk menanamkan keyakinan dan kepercayaan atas kandidat yang dipilih. Terdapat empat model yang kemudian menjadi strategi kandidat dan parpol pengusung antara lain: model simbolisasi politik, penguatan kapasitas tokoh politik/kandidat, penguatan visi misi kandidat, dan strategi marketing politik.

Daftar Pustaka

- Abercrombie, Nicholas. Dkk. 2010. *Kamus Sosiologi* (Penerjemah Desy Noviyani, dkk). Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Bachtiar, Wardi. 2006. *Sosiologi Klasik dari Comte hingga Parsons*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Efriza. 2012. *Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta.
- Firmanzah 2008. *Mengelola Partai Politik, Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Marsh, David & Stoker, Gerry. 2010. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik (Theory and Methods in Political Science)*. Bandung: Nusamedia.
- Pahmi, Sy. 2010. *Politik Pencitraan*. Jakarta: Gayung Persada Perss.
- Ritzer, George & Goodman, Douglas J. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- 2010. *Sosiologi Ilmu Berpengetahuan Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudaryanti. Analisis tentang Perilaku Pemilih pada Pilkada tahun 2005 di Surakarta (Studi Deskriptif tentang Perilaku PNS Pemerintah Kota Surakarta dalam Pilkada tahun 2005 di Surakarta). *Dalam Jurnal Spirit Publik, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2008*.

Surbakti, Ramlan 1997. Ramlan Surbakti, *Partai, Pemilihan dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.